JARINGAN KEBIJAKAN EKOWISATA KAWASAN HUTAN MANGROVE DI KOTA LANGSA PROVINSI ACEH

Sabilla Intan Dian Prawira W.RB
NPP. 33.0042
Program Studi Kebijakan Publik
Email: sabilaintandianprawirabuana@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Adfin Rochmad Baidhowah, S.IP., M.PA
Email: adfin.baidhowah@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *This study focuses on the limited study of policy networks in the development of mangrove ecotourism in Langsa City. Previous studies on mangrove ecotourism in Langsa City have mostly discussed economic potential, ecological value, and tourism development, while studies that specifically examine the actors, relationships, and positions within the policy network are still limited.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the policy network of mangrove forest ecotourism development in Langsa City, Aceh Province.* ***Method:*** *This study uses a qualitative approach with Waarden's (1992) policy network theory, which consists of seven dimensions of analysis. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed descriptively with the support of Social Network Analysis (SNA) using Gephi to map the position and relationship among actors.* ***Result:*** *The results show that the actors involved include the Tourism Office, PT Pekola, village/gampong, district, local community actors represented by parking attendants and monkey handlers, community groups, students, and visitors. However, the network structure tends to be centralized around PT Pekola as the dominant actor, while other actors remain in peripheral positions. The interaction among actors is also still limited, marked by unstructured coordination, non-sustained cooperation, and the absence of a collaborative forum that actively involves all parties.* ***Conclusion:*** *The policy network of mangrove forest ecotourism in Langsa City has not been optimally integrated because the quality of relationships, coordination, and connectivity among actors remains weak.*
Keywords: *Ecotourism; Mangrove Forest; Policy Network; Social Network Analysis; Stakeholders*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penelitian ini berfokus pada masih terbatasnya kajian mengenai jaringan kebijakan dalam pengembangan ekowisata mangrove di Kota Langsa. Penelitian terdahulu tentang ekowisata mangrove di Kota Langsa lebih banyak membahas potensi ekonomi, nilai ekologis, dan pengembangan wisata, sedangkan kajian yang secara khusus melihat aktor, hubungan, serta posisi antaraktor dalam jaringan kebijakan masih terbatas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaringan kebijakan ekowisata kawasan hutan mangrove di Kota Langsa Provinsi Aceh. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori jaringan kebijakan Waarden (1992) yang terdiri atas tujuh dimensi analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif dengan dukungan *Social Network Analysis* (SNA) menggunakan aplikasi Gephi untuk memetakan posisi dan hubungan antaraktor. **Hasil/Temuan:**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor yang terlibat meliputi Dinas Pariwisata, PT Pekola, desa, kecamatan, masyarakat lokal yang direpresentasikan melalui tukang parkir dan pawang monyet, komunitas, mahasiswa, serta pengunjung. Namun, struktur jaringan masih cenderung terpusat pada PT Pekola sebagai aktor dominan, sedangkan aktor lain berada pada posisi periferal. Interaksi antaraktor juga masih terbatas, ditandai dengan koordinasi yang belum terstruktur, kerja sama yang belum berkelanjutan, serta belum adanya forum kolaboratif yang melibatkan seluruh pihak secara aktif. **Kesimpulan:** Jaringan kebijakan ekowisata kawasan hutan mangrove di Kota Langsa belum terintegrasi secara optimal karena kualitas hubungan, koordinasi, dan keterhubungan antaraktor masih lemah.
Kata kunci: Ekowisata; Hutan Mangrove; Jaringan Kebijakan; Pemangku Kepentingan; *Social Network Analysis*.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pariwisata daerah tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi wilayah secara berkelanjutan. Dalam konteks daerah pesisir, pengembangan pariwisata perlu memperhatikan keseimbangan antara manfaat ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat lokal. Salah satu bentuk pariwisata yang sejalan dengan prinsip tersebut adalah ekowisata, karena ekowisata menekankan pemanfaatan kawasan alam dengan tetap memperhatikan konservasi lingkungan, manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat lokal, serta keberlanjutan pengelolaan kawasan wisata (Santoso, 2017).

Kawasan hutan mangrove memiliki peran penting dalam pengembangan ekowisata karena tidak hanya menjadi objek wisata alam, tetapi juga memiliki fungsi ekologis bagi wilayah pesisir. Mangrove berperan sebagai pelindung kawasan pantai, habitat berbagai biota, serta sumber penghidupan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pengembangan ekowisata mangrove tidak dapat hanya diarahkan pada peningkatan aktivitas wisata, tetapi juga harus memperhatikan aspek konservasi, daya dukung kawasan, dan keterlibatan pihak-pihak yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan tersebut.

Kota Langsa merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ekowisata mangrove yang cukup menonjol. Kawasan Hutan Mangrove Kuala Langsa menjadi salah satu destinasi wisata berbasis alam yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi. Pengelolaan kawasan ini juga telah didukung oleh kebijakan daerah melalui Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Langsa (Pemerintah Kota Langsa, 2015). Keberadaan qanun tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Kota Langsa tidak hanya menjadi kegiatan sektoral, tetapi juga bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah.

Namun, pengembangan ekowisata mangrove tidak cukup hanya didukung oleh potensi alam dan regulasi. Pengelolaan kawasan wisata membutuhkan keterlibatan berbagai aktor, seperti pemerintah daerah, pengelola kawasan, masyarakat lokal, komunitas, akademisi, pelaku usaha, dan pengunjung. Hal ini sejalan dengan pandangan Waarden (1992) yang menjelaskan bahwa kebijakan publik dapat dipahami melalui jaringan hubungan antaraktor, fungsi jaringan, struktur hubungan, tingkat pelembagaan, aturan interaksi, distribusi kekuasaan, dan strategi aktor.

Dalam konteks Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa, persoalan yang muncul bukan hanya berkaitan dengan keberadaan aktor, tetapi juga dengan bagaimana hubungan dan koordinasi antaraktor tersebut berjalan. Hasil awal penelitian menunjukkan bahwa aktor yang terlibat dalam pengembangan kawasan meliputi Dinas Pariwisata, PT Pekola, masyarakat lokal, komunitas, mahasiswa, dan pengunjung. Akan tetapi, hubungan antaraktor belum sepenuhnya berjalan merata karena struktur jaringan masih cenderung terpusat pada PT Pekola sebagai aktor dominan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata mangrove perlu dilihat melalui pendekatan jaringan kebijakan agar hubungan, peran, dan posisi antaraktor dapat dipahami secara lebih jelas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai jaringan kebijakan ekowisata kawasan hutan mangrove di Kota Langsa penting dilakukan. Penelitian ini tidak hanya melihat pengembangan ekowisata dari sisi potensi kawasan, tetapi juga dari sisi hubungan antaraktor yang memengaruhi keberjalanan kebijakan di lapangan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya jaringan kebijakan dalam pengembangan ekowisata kawasan hutan mangrove di Kota Langsa. Permasalahan ini terlihat dari hubungan antaraktor yang belum merata, koordinasi yang belum terstruktur, kerja sama yang belum berkelanjutan, serta belum adanya forum kolaboratif yang melibatkan seluruh pihak secara aktif. Padahal, pengembangan ekowisata mangrove membutuhkan kerja sama yang kuat karena pengelolaannya berkaitan dengan kepentingan pemerintah, pengelola kawasan, masyarakat lokal, komunitas, dan pihak lain yang berhubungan dengan kawasan wisata.

Roxas et al. (2020) menjelaskan bahwa tata kelola destinasi wisata berkelanjutan membutuhkan pemetaan peran stakeholder agar regulasi, konservasi, dan manfaat ekonomi masyarakat dapat berjalan saling mendukung. Pandangan ini memperkuat bahwa penelitian mengenai ekowisata mangrove tidak cukup hanya melihat potensi kawasan, tetapi juga perlu membaca posisi dan hubungan aktor di dalam proses kebijakan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pengembangan ekowisata mangrove dari sudut pandang potensi wisata, daya dukung kawasan, strategi pengembangan, dan keterlibatan stakeholder. Azzahra et al. (2023) meneliti pengembangan ekowisata mangrove di Taman Nasional Karimunjawa dengan melihat potensi atraksi, daya dukung, pengaruh stakeholder, dan strategi pengembangan kawasan. Penelitian tersebut relevan karena menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata mangrove membutuhkan dukungan stakeholder dan strategi pengelolaan yang tepat.

Penelitian lain oleh Alfiandri et al. (2024) membahas collaborative governance dalam pengembangan ekowisata mangrove di Pulau Bintan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ekowisata mangrove memerlukan sinkronisasi antarstakeholder agar pengembangan kawasan dapat berjalan sesuai tujuan bersama. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menekankan pentingnya hubungan dan koordinasi antaraktor dalam ekowisata mangrove.

Kajian internasional juga menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove tidak dapat dilepaskan dari jaringan aktor. Khan et al. (2024) meneliti jaringan kekuasaan aktor dalam tata kelola hutan mangrove di Sundarbans, Bangladesh, dan menunjukkan bahwa hubungan antaraktor berpengaruh terhadap dinamika pengelolaan hutan mangrove. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa tata kelola mangrove memerlukan analisis terhadap hubungan, posisi, dan pengaruh aktor dalam jaringan.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji jaringan kebijakan dalam pengembangan ekowisata hutan mangrove di Kota Langsa masih terbatas. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas potensi ekonomi, nilai ekologis, strategi pengembangan wisata, atau pengelolaan mangrove secara umum. Penelitian ini berbeda karena secara khusus menganalisis aktor yang terlibat serta hubungan jaringan kebijakan dalam pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa memiliki potensi yang besar sebagai destinasi wisata alam, kawasan konservasi, dan sumber penggerak ekonomi

masyarakat. Potensi tersebut perlu dikelola secara berkelanjutan agar tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan memperkuat keterlibatan masyarakat lokal. Dalam pengembangan ekowisata, pengelolaan kawasan tidak dapat bertumpu pada satu aktor saja, melainkan membutuhkan koordinasi dan kerja sama yang jelas antarpihak.

Osman et al. (2018) menunjukkan bahwa kolaborasi stakeholder dalam perencanaan ekowisata penting karena pengelolaan yang hanya bersifat konsultatif belum cukup untuk menjawab ketidakseimbangan hubungan antarpihak. Hal ini memperkuat urgensi penelitian ini karena pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa juga membutuhkan pola hubungan yang lebih jelas antara pemerintah, pengelola, masyarakat, dan aktor pendukung lainnya.

Urgensi penelitian ini juga berkaitan dengan kebutuhan Pemerintah Kota Langsa dalam memperkuat tata kelola pengembangan ekowisata mangrove. Apabila hubungan antaraktor tidak terpetakan dengan baik, maka pengembangan kawasan berisiko berjalan kurang efektif karena masing-masing aktor dapat bergerak secara terpisah tanpa arah koordinasi yang kuat. Bainbridge et al. (2011) menjelaskan bahwa pemetaan jaringan kebijakan dapat membantu memahami struktur tata kelola dan hubungan antaraktor dalam pelaksanaan kebijakan lingkungan. Oleh karena itu, analisis jaringan kebijakan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai aktor kunci, posisi aktor, dan pola hubungan yang terbentuk dalam pengelolaan ekowisata mangrove.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Langsa dan pengelola kawasan dalam memperkuat koordinasi, memperjelas pembagian peran, serta membangun kolaborasi yang lebih berkelanjutan. Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pengembangan ekowisata mangrove berpotensi tetap berjalan dengan pola hubungan yang belum terintegrasi, sehingga peran aktor pendukung seperti masyarakat lokal, komunitas, mahasiswa, dan pihak lain belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas pengembangan ekowisata, koordinasi pemangku kepentingan, pengelolaan ekowisata mangrove, collaborative governance, serta jaringan aktor dalam tata kelola kawasan pesisir. Penelitian-penelitian tersebut menjadi pembanding karena memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian ini, yaitu jaringan kebijakan dalam pengembangan ekowisata kawasan hutan mangrove di Kota Langsa.

Putri dan Munawaroh (2018) mengkaji koordinasi pemangku kepentingan dalam meningkatkan strategi pengembangan Destination Management Organization (DMO) di Pangandaran. Penelitian tersebut menekankan bahwa pengembangan destinasi wisata membutuhkan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan agar peran masing-masing pihak dapat berjalan searah. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis karena sama-sama melihat pentingnya hubungan antaraktor dalam pengembangan kawasan wisata, meskipun penelitian penulis lebih menekankan pada jaringan kebijakan ekowisata mangrove.

Doni dan Prasetyo (2021) membahas pengembangan kawasan ekowisata dalam Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Labuhanbatu melalui pariwisata berbasis masyarakat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata perlu memperhatikan potensi lokal, dukungan pemerintah daerah, dan keterlibatan masyarakat. Kajian ini relevan karena ekowisata tidak hanya membutuhkan daya tarik alam, tetapi juga memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan kawasan.

Santoso (2017) meneliti ecotourism pada tingkat komunitas di kawasan wisata Pangandaran. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa komunitas lokal memiliki peran penting dalam mendukung prinsip-prinsip ekowisata, terutama dalam menjaga keberlanjutan kawasan wisata. Penelitian ini menjadi

pembanding bagi penelitian penulis karena dalam pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa, masyarakat lokal dan komunitas juga menjadi aktor yang memiliki hubungan dengan pengelolaan kawasan.

Alfiandri et al. (2024) meneliti pengembangan ekowisata mangrove berkelanjutan melalui pendekatan collaborative governance di Pulau Bintan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata mangrove membutuhkan sinkronisasi antarstakeholder agar pengelolaan kawasan dapat berjalan sesuai visi dan tujuan bersama. Penelitian ini sejalan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas pentingnya hubungan antaraktor dalam pengembangan ekowisata mangrove.

Alfiandri dan Irawan (2023) mengkaji collaborative governance dalam kebijakan ekowisata mangrove di Pulau Bintan dengan pendekatan penta helix. Penelitian tersebut melihat keterlibatan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media dalam pelaksanaan kebijakan ekowisata mangrove. Kajian ini relevan karena menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata mangrove perlu didukung oleh keterlibatan berbagai aktor, sedangkan penelitian penulis lebih lanjut menganalisis posisi dan hubungan antaraktor dalam jaringan kebijakan.

Azzahra et al. (2023) meneliti pengembangan ekowisata mangrove di Taman Nasional Karimunjawa. Penelitian tersebut membahas potensi atraksi wisata, daya dukung kawasan, dukungan stakeholder, dan strategi pengembangan ekowisata mangrove. Penelitian ini berkaitan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas pengembangan ekowisata mangrove, tetapi penelitian penulis tidak hanya melihat strategi pengembangan, melainkan juga hubungan aktor dalam jaringan kebijakan.

Bainbridge et al. (2011) mengkaji rapid policy network mapping sebagai metode untuk memahami struktur tata kelola dalam implementasi kebijakan lingkungan laut. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemetaan jaringan kebijakan dapat membantu menjelaskan aktor yang terlibat, pola hubungan, serta posisi aktor dalam proses kebijakan. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena memberikan dasar bahwa kebijakan lingkungan dan kawasan pesisir dapat dianalisis melalui hubungan antaraktor dalam jaringan.

Nijamdeen et al. (2022) meneliti jaringan stakeholder dalam pengelolaan mangrove di Provinsi Utara Sri Lanka dengan menggunakan *Social Network Analysis*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove yang berkelanjutan membutuhkan keterhubungan yang baik antarstakeholder. Penelitian ini memiliki kedekatan dengan penelitian penulis karena sama-sama menggunakan pendekatan jaringan untuk memahami hubungan antaraktor dalam pengelolaan mangrove.

Khan et al. (2024) meneliti jaringan kekuasaan aktor dalam tata kelola hutan mangrove di Sundarbans, Bangladesh. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola mangrove dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, posisi aktor, dan hubungan antaraktor pada berbagai tingkatan. Penelitian ini relevan sebagai pembanding internasional karena memperlihatkan bahwa pengelolaan mangrove tidak hanya ditentukan oleh potensi alam, tetapi juga oleh kualitas hubungan dan pengaruh aktor dalam jaringan.

Sahudra et al. (2020) membahas peran qanun dalam pengembangan ekowisata hutan mangrove di Kuala Langsa, Aceh. Penelitian tersebut memiliki kesamaan lokus dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas ekowisata mangrove di Kuala Langsa. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pada peran regulasi dalam pengembangan ekowisata, sedangkan penelitian penulis berfokus pada jaringan kebijakan, aktor yang terlibat, serta hubungan antaraktor dalam pengembangan kawasan.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata mangrove membutuhkan keterlibatan berbagai aktor, koordinasi yang baik, dukungan stakeholder, serta tata kelola yang berkelanjutan. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada koordinasi pemangku kepentingan, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, collaborative governance, strategi pengembangan ekowisata mangrove, pemetaan jaringan kebijakan,

atau peran regulasi. Penelitian yang secara khusus menganalisis jaringan kebijakan ekowisata kawasan hutan mangrove di Kota Langsa masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda karena menempatkan aktor, posisi aktor, dan hubungan antaraktor sebagai fokus utama dalam memahami pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena mengkaji pengembangan ekowisata mangrove di Kota Langsa melalui pendekatan jaringan kebijakan. Penelitian terdahulu mengenai ekowisata mangrove umumnya lebih banyak membahas potensi kawasan, strategi pengembangan, daya dukung, manfaat ekonomi, atau konservasi lingkungan. Sementara itu, penelitian ini secara khusus melihat bagaimana aktor-aktor yang terlibat saling berhubungan, bagaimana posisi aktor dalam jaringan, serta bagaimana kualitas hubungan tersebut memengaruhi pengembangan ekowisata mangrove.

Salman et al. (2023) menunjukkan bahwa keberlanjutan ekowisata dipengaruhi oleh kompleksitas banyak pemangku kepentingan dengan kepentingan dan tingkat pengaruh yang berbeda. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membaca pengembangan ekowisata mangrove melalui jaringan kebijakan, bukan hanya melalui potensi wisata atau strategi pengembangan kawasan.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada penggunaan teori jaringan kebijakan Waarden (1992) dalam konteks ekowisata hutan mangrove di tingkat daerah. Melalui tujuh dimensi jaringan kebijakan, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi aktor, tetapi juga melihat fungsi jaringan, struktur hubungan, tingkat pelembagaan, aturan interaksi, distribusi kekuasaan, dan strategi aktor. Pendekatan ini memberi ruang untuk memahami pengembangan ekowisata mangrove sebagai proses kebijakan yang melibatkan banyak aktor.

Dari segi metode pendukung, penelitian ini juga menggunakan *Social Network Analysis* (SNA) dengan aplikasi Gephi untuk membantu memetakan posisi dan hubungan antaraktor. Penggunaan SNA dalam penelitian ini menjadi penting karena hubungan antaraktor tidak hanya dijelaskan secara naratif, tetapi juga divisualisasikan agar struktur jaringan dapat terlihat lebih jelas. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan kajian kebijakan publik, khususnya terkait jaringan kebijakan, tata kelola pariwisata berkelanjutan, dan pengelolaan ekowisata mangrove di daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jaringan kebijakan ekowisata kawasan hutan mangrove di Kota Langsa Provinsi Aceh.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam jaringan kebijakan dalam pengembangan ekowisata kawasan hutan mangrove di Kota Langsa. Permasalahan yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aktor, tetapi juga menyangkut hubungan, koordinasi, posisi, dan pola interaksi antaraktor dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan ekowisata. Oleh karena itu, metode kualitatif deskriptif dinilai tepat karena mampu menggambarkan dinamika jaringan kebijakan secara lebih kontekstual berdasarkan kondisi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan teori jaringan kebijakan Waarden (1992) yang mencakup tujuh dimensi, yaitu aktor, fungsi, struktur, pelembagaan, aturan bertindak, hubungan kekuasaan, dan strategi aktor. Teori tersebut digunakan karena sesuai dengan fokus penelitian yang tidak hanya melihat siapa

saja aktor yang terlibat, tetapi juga bagaimana hubungan, peran, dan posisi aktor dalam pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai bentuk koordinasi, pembagian peran, kerja sama, serta kendala hubungan antaraktor. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi kawasan, aktivitas aktor, dan pelaksanaan pengelolaan ekowisata di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk menelaah data pendukung seperti regulasi, data kunjungan wisatawan, dokumen pengelolaan kawasan, serta arsip visual yang berkaitan dengan pengembangan ekowisata mangrove.

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan, peran, dan pemahaman terhadap pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa. Informan penelitian berjumlah 9 orang, terdiri atas Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Langsa, Manager Ekowisata Hutan Mangrove, 3 wisatawan kawasan ekowisata, 1 tukang parkir, 1 pawang monyet, dan 2 mahasiswa. Komposisi informan tersebut dipilih agar data yang diperoleh dapat menggambarkan jaringan kebijakan dari sisi pemerintah, pengelola operasional, masyarakat lokal, dan pengguna kawasan wisata. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Langsa karena memiliki kewenangan dan pemahaman terhadap arah kebijakan pengembangan pariwisata daerah. Selain itu, Manager Ekowisata Hutan Mangrove juga menjadi informan utama karena memahami langsung pengelolaan operasional kawasan di lapangan.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pemerintah daerah, pengelola kawasan, masyarakat lokal, mahasiswa, dan wisatawan. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data yang diperoleh tidak hanya bertumpu pada satu sumber informasi. Dengan cara tersebut, data yang digunakan dalam penelitian dapat lebih kuat dan sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif dengan dukungan *Social Network Analysis* (SNA) menggunakan aplikasi Gephi. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan dimensi jaringan kebijakan. Sementara itu, SNA digunakan untuk memetakan hubungan antaraktor, melihat posisi aktor dalam jaringan, serta mengetahui aktor yang memiliki peran sentral dalam pengembangan ekowisata mangrove. Penggunaan Gephi membantu penulis menampilkan pola hubungan antaraktor secara visual sehingga struktur jaringan kebijakan dapat dibaca dengan lebih jelas.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Langsa Provinsi Aceh, khususnya pada Dinas Pariwisata Kota Langsa dan Kawasan Hutan Mangrove Kota Langsa. Dinas Pariwisata dipilih karena memiliki peran strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan ekowisata, sedangkan Kawasan Hutan Mangrove Kota Langsa dipilih karena menjadi objek utama pengembangan ekowisata yang melibatkan berbagai aktor dan jaringan kerja sama. Pengumpulan data penelitian dilaksanakan pada Januari sampai Februari 2026 melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan kebijakan pengembangan ekowisata mangrove.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis jaringan kebijakan ekowisata kawasan hutan mangrove di Kota Langsa Provinsi Aceh dengan menggunakan teori jaringan kebijakan dari Waarden (1992). Teori ini digunakan untuk melihat keterlibatan aktor, fungsi jaringan, struktur hubungan, tingkat pelembagaan, aturan interaksi, relasi kekuasaan, dan strategi aktor dalam pengembangan ekowisata mangrove. Analisis ini juga didukung dengan *Social Network Analysis* (SNA) menggunakan aplikasi Gephi untuk membantu memetakan posisi dan hubungan antaraktor dalam jaringan kebijakan.

3.1. Aktor dalam Jaringan Kebijakan

Aktor merupakan bagian awal yang perlu dilihat dalam jaringan kebijakan karena dari aktor dapat diketahui siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana perannya, dan sejauh mana keterlibatan mereka dalam pengembangan ekowisata kawasan hutan mangrove di Kota Langsa. Berdasarkan hasil penelitian dan visualisasi Gephi, aktor yang terlibat dalam jaringan kebijakan ini terdiri atas Dinas Pariwisata Kota Langsa, PT Pekola, desa, kecamatan, masyarakat lokal yang direpresentasikan melalui tukang parkir dan pawang monyet, komunitas, mahasiswa, serta pengunjung.

Dinas Pariwisata Kota Langsa berperan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengembangan pariwisata daerah. Dalam pengembangan ekowisata mangrove, Dinas Pariwisata berada pada posisi yang berkaitan dengan arah kebijakan dan pembinaan sektor pariwisata. Sementara itu, PT Pekola berperan sebagai pengelola operasional kawasan. Peran PT Pekola terlihat lebih langsung karena aktor ini berhubungan dengan pengelolaan kawasan, fasilitas, dan aktivitas harian di lokasi ekowisata.

Selain Dinas Pariwisata dan PT Pekola, terdapat aktor pendukung yang ikut muncul dalam jaringan, yaitu desa, kecamatan, tukang parkir, pawang monyet, komunitas, mahasiswa, dan pengunjung. Desa dan kecamatan memiliki posisi sebagai aktor pendukung administratif yang berkaitan dengan wilayah sekitar kawasan. Sementara itu, tukang parkir dan pawang monyet merepresentasikan keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas pendukung wisata. Komunitas dan mahasiswa biasanya terlibat pada kegiatan tertentu, seperti kegiatan lingkungan, edukasi, penelitian, atau penanaman mangrove. Pengunjung juga menjadi bagian dari jaringan karena menggunakan fasilitas kawasan dan ikut memengaruhi keberlangsungan aktivitas wisata melalui kunjungan yang dilakukan.

Hal tersebut juga terlihat dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pariwisata Disporapar Kota Langsa yang menjelaskan bahwa Dinas Pariwisata lebih berperan dalam penyusunan kebijakan, pembinaan, pengawasan, monitoring, dan koordinasi dengan pengelola. Sementara itu, PT Pekola memiliki peran utama di lapangan, mulai dari pengelolaan kawasan, penyediaan fasilitas, sampai pelayanan kepada pengunjung. Koordinasi antara keduanya tetap berjalan, meskipun lebih sering dilakukan sesuai kebutuhan ketika ada evaluasi atau hal tertentu yang perlu dibahas bersama.

Keterlibatan masyarakat lokal penting diperhatikan karena pengembangan wisata berbasis masyarakat membutuhkan kesiapan dan dukungan masyarakat di sekitar lokasi wisata. Felani dan Rahmadi (2022) menunjukkan bahwa masyarakat di sekitar kawasan wisata dapat menjadi bagian penting dalam pengembangan wisata melalui keterlibatan sebagai pelaku usaha, penyedia jasa, maupun pendukung aktivitas wisata.

Tabel 1.
Aktor dalam Jaringan Kebijakan Ekowisata Hutan Mangrove Kota Langsa

No	Aktor	Posisi dalam Jaringan	Peran Utama
1	Dinas Pariwisata Kota Langsa	Aktor utama	Pembinaan, pengawasan, dan dukungan pengembangan pariwisata daerah

2	PT Pekola	Aktor utama	Pengelolaan operasional kawasan ekowisata mangrove
3	Desa	Aktor pendukung administratif	Mendukung keterhubungan pengelolaan kawasan dengan lingkungan masyarakat sekitar
4	Kecamatan	Aktor pendukung administratif	Mendukung koordinasi kewilayahan dalam pengembangan kawasan ekowisata
5	Tukang parkir	Aktor pendukung masyarakat lokal	Mendukung pelayanan kawasan dan aktivitas ekonomi wisata di sekitar lokasi
6	Pawang monyet	Aktor pendukung masyarakat lokal	Mendukung aktivitas wisata dan interaksi pengunjung dengan kawasan
7	Komunitas	Aktor pendukung	Terlibat dalam kegiatan sosial, lingkungan, dan edukasi kawasan
8	Mahasiswa	Aktor pendukung	Terlibat dalam kegiatan penelitian, edukasi, dan kegiatan lingkungan
9	Pengunjung	Aktor pendukung	Pengguna fasilitas kawasan dan penerima manfaat layanan ekowisata

Sumber: Hasil Pengolahan dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan visualisasi Gephi, 2026.

Berdasarkan **Tabel 1**, aktor dalam jaringan kebijakan ekowisata mangrove di Kota Langsa sudah cukup beragam karena melibatkan unsur pemerintah, pengelola kawasan, aktor administratif kewilayahan, masyarakat lokal, komunitas, mahasiswa, dan pengguna kawasan wisata. Akan tetapi, tingkat keterlibatan setiap aktor tidak sama. Dinas Pariwisata dan PT Pekola menjadi aktor yang paling terlihat dalam pengembangan kawasan, sedangkan desa, kecamatan, tukang parkir, pawang monyet, komunitas, mahasiswa, dan pengunjung lebih banyak berada pada posisi pendukung.

Perbedaan tingkat keterlibatan tersebut terlihat dari posisi PT Pekola yang lebih dominan dalam pengelolaan operasional kawasan. PT Pekola memiliki hubungan langsung dengan pengelolaan fasilitas dan aktivitas di lapangan, sementara Dinas Pariwisata berada pada fungsi pembinaan dan pengawasan. Aktor pendukung tetap memiliki ruang untuk terlibat, tetapi keterlibatannya belum berlangsung secara tetap. Mereka lebih sering hadir pada kegiatan tertentu, misalnya kegiatan lingkungan, penelitian, edukasi, pelayanan wisata, koordinasi kewilayahan, atau aktivitas pendukung di sekitar kawasan.

Hasil ini memperlihatkan bahwa jaringan kebijakan ekowisata mangrove di Kota Langsa sudah memiliki aktor yang cukup lengkap, tetapi belum semua aktor memiliki peran yang seimbang. Pengelolaan kawasan masih banyak bertumpu pada aktor utama, terutama PT Pekola sebagai pengelola lapangan. Sementara itu, aktor pendukung masih perlu diberi ruang keterlibatan yang lebih jelas agar pengembangan ekowisata mangrove tidak hanya berjalan dari sisi pengelolaan operasional, tetapi juga didukung oleh partisipasi masyarakat, aktor kewilayahan, dan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap kawasan.

3.2. Fungsi Jaringan

Fungsi jaringan dalam pengembangan ekowisata kawasan hutan mangrove di Kota Langsa dapat dilihat dari bagaimana hubungan antaraktor digunakan untuk menjalankan pengelolaan kawasan. Dalam jaringan kebijakan, hubungan antaraktor tidak hanya menunjukkan siapa yang terlibat, tetapi juga memperlihatkan untuk apa hubungan tersebut dibangun. Pada pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa, fungsi jaringan terlihat dalam bentuk koordinasi, pembinaan, pengelolaan operasional, serta dukungan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan kawasan mangrove.

Dinas Pariwisata Kota Langsa memiliki fungsi yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan pengembangan pariwisata daerah. Fungsi ini terlihat dari hubungan Dinas Pariwisata dengan PT Pekola sebagai pengelola kawasan. Hubungan tersebut menjadi jalur utama dalam

pelaksanaan pengembangan ekowisata, terutama karena PT Pekola berperan langsung dalam pengelolaan operasional di lapangan. Melalui hubungan ini, kebijakan dan arahan pengembangan pariwisata dapat diteruskan ke pengelolaan kawasan secara lebih teknis.

PT Pekola memiliki fungsi yang lebih dominan dalam jaringan karena menjadi penghubung antara pengelolaan kawasan dengan aktor-aktor lain. Dalam hasil visualisasi Gephi, PT Pekola terlihat memiliki hubungan langsung dengan seluruh aktor yang terlibat, seperti Dinas Pariwisata, desa, kecamatan, tukang parkir, pawang monyet, komunitas, mahasiswa, dan pengunjung. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa PT Pekola tidak hanya berperan sebagai pengelola kawasan, tetapi juga menjadi titik penghubung utama dalam jaringan kebijakan ekowisata mangrove.

Pada aktor pendukung, fungsi jaringan lebih banyak terlihat dalam kegiatan tertentu. Masyarakat lokal dapat mendukung aktivitas kawasan melalui peran yang berkaitan dengan lingkungan sekitar ekowisata. Komunitas dan mahasiswa dapat hadir dalam kegiatan lingkungan, edukasi, penelitian, atau penanaman mangrove. Pengunjung berperan sebagai pengguna kawasan yang memanfaatkan fasilitas wisata dan ikut memengaruhi keberlangsungan aktivitas ekowisata. Namun, fungsi aktor pendukung tersebut belum selalu berjalan secara tetap karena keterlibatannya masih bergantung pada kegiatan atau momen tertentu.

Hapsari dan Ardiansyah (2020) menunjukkan bahwa pengembangan kawasan ekowisata membutuhkan tata kelola yang baik, sinergi antarpihak, dan partisipasi aktif masyarakat. Temuan tersebut sesuai dengan fungsi jaringan dalam penelitian ini karena hubungan antaraktor diperlukan agar pengelolaan ekowisata mangrove tidak hanya berjalan dari sisi operasional, tetapi juga mendapat dukungan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan kawasan.

Hubungan antara Dinas Pariwisata dan PT Pekola menjadi fungsi jaringan yang paling terlihat karena berlangsung lebih berkelanjutan dibandingkan hubungan dengan aktor pendukung. Sementara itu, hubungan dengan desa, kecamatan, masyarakat lokal, komunitas, dan mahasiswa masih belum stabil.

Fungsi jaringan pada pengembangan ekowisata mangrove di Kota Langsa sudah berjalan pada aspek koordinasi inti dan pengelolaan operasional kawasan. Akan tetapi, fungsi tersebut belum sepenuhnya melibatkan seluruh aktor secara seimbang. Jaringan masih lebih kuat pada hubungan antara Dinas Pariwisata dan PT Pekola, sedangkan fungsi masyarakat, komunitas, mahasiswa, dan pengunjung masih lebih terbatas pada dukungan kegiatan tertentu. Keadaan ini membuat jaringan kebijakan belum sepenuhnya menjadi ruang kolaborasi yang aktif bagi seluruh aktor yang terlibat dalam pengembangan ekowisata mangrove.

3.3. Struktur Hubungan Antaraktor

Struktur hubungan dalam jaringan kebijakan menunjukkan bagaimana pola keterhubungan antaraktor terbentuk dalam pengembangan ekowisata kawasan hutan mangrove di Kota Langsa. Struktur ini penting untuk melihat apakah hubungan antaraktor berjalan merata atau justru terpusat pada aktor tertentu. Dalam penelitian ini, struktur hubungan antaraktor tidak hanya dilihat dari hasil wawancara, tetapi juga didukung dengan visualisasi *Social Network Analysis* menggunakan aplikasi Gephi.

Gambar 1.
Hasil Visualisasi Gephi Jaringan Kebijakan Ekowisata Hutan Mangrove Kota Langsa

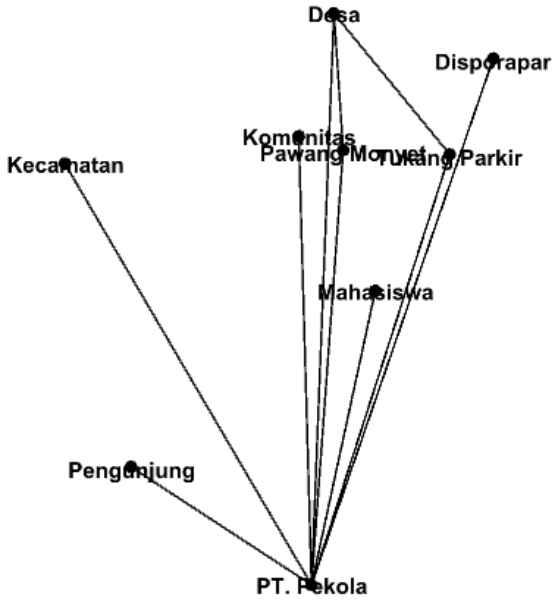

Sumber: Hasil Pengolahan dari data hubungan antaraktor menggunakan aplikasi Gephi, 2026.

Berdasarkan **Gambar 1**, struktur jaringan kebijakan ekowisata mangrove di Kota Langsa menunjukkan pola yang masih cenderung terpusat pada PT Pekola. PT Pekola memiliki hubungan langsung dengan aktor-aktor lain, seperti Dinas Pariwisata, desa, kecamatan, tukang parkir, pawang monyet, komunitas, mahasiswa, dan pengunjung. Posisi ini menunjukkan bahwa PT Pekola menjadi aktor yang paling banyak terhubung dalam jaringan, terutama karena perannya sebagai pengelola operasional kawasan.

Hubungan antara PT Pekola dan Dinas Pariwisata menjadi hubungan yang paling menonjol dalam struktur jaringan. Dinas Pariwisata berada pada posisi pembinaan dan pengawasan, sedangkan PT Pekola berada pada posisi pelaksana operasional di lapangan. Hubungan keduanya menjadi jalur utama dalam pengelolaan kawasan karena berkaitan langsung dengan arah kebijakan, pengawasan, dan pelaksanaan kegiatan ekowisata. Pola ini membuat pengelolaan kawasan lebih banyak bergerak melalui hubungan antara pemerintah daerah dan pengelola kawasan.

Aktor lain seperti desa, kecamatan, tukang parkir, pawang monyet, komunitas, mahasiswa, dan pengunjung tetap muncul dalam jaringan, tetapi hubungannya belum sekuat aktor utama. Desa dan kecamatan berada pada posisi pendukung administratif, tukang parkir dan pawang monyet berkaitan dengan aktivitas masyarakat lokal di sekitar kawasan, komunitas dan mahasiswa biasanya hadir dalam kegiatan lingkungan atau edukasi, sedangkan pengunjung terhubung melalui aktivitas wisata. Hubungan tersebut menunjukkan adanya ruang keterlibatan, tetapi belum membentuk jaringan yang merata antaraktor.

Struktur hubungan yang terpusat pada PT Pekola memperlihatkan bahwa jaringan kebijakan belum sepenuhnya tersebar secara seimbang. Dalam praktiknya, aktor pendukung belum memiliki hubungan langsung yang kuat satu sama lain. Keterlibatan mereka masih lebih sering melalui PT Pekola

atau kegiatan tertentu yang bersifat situasional. Hal ini membuat jaringan kebijakan berjalan, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan kolaborasi yang aktif antarsemua aktor.

3.4. Tingkat Pelembagaan

Tingkat pelembagaan dalam jaringan kebijakan digunakan untuk melihat sejauh mana hubungan antaraktor telah terbentuk secara formal, stabil, dan berkelanjutan. Dalam pengembangan ekowisata kawasan hutan mangrove di Kota Langsa, pelembagaan hubungan antaraktor belum sepenuhnya berjalan kuat. Hubungan yang paling terlihat masih berada pada Dinas Pariwisata dan PT Pekola karena keduanya memiliki peran utama dalam pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan kawasan.

Hubungan antara Dinas Pariwisata dan PT Pekola cenderung lebih stabil dibandingkan hubungan dengan aktor lain. Dinas Pariwisata memiliki peran pada sisi kebijakan dan pembinaan, sedangkan PT Pekola menjadi pengelola operasional kawasan. Hubungan keduanya menjadi bagian penting dalam pengembangan ekowisata mangrove karena menyangkut pengawasan, pengelolaan fasilitas, dan keberlangsungan aktivitas wisata di lapangan.

Namun, hubungan dengan aktor pendukung seperti masyarakat lokal, komunitas, dan mahasiswa belum memiliki pola yang benar-benar tetap. Keterlibatan mereka lebih banyak muncul pada kegiatan tertentu, seperti kegiatan lingkungan, penanaman mangrove, edukasi, penelitian, atau aktivitas sosial yang berkaitan dengan kawasan. Pola seperti ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktor pendukung sudah ada, tetapi belum sepenuhnya dilembagakan dalam mekanisme kerja sama yang rutin.

Keterangan tersebut sejalan dengan hasil wawancara Manager Ekowisata Hutan Mangrove yang menyampaikan bahwa aktor utama dalam pengelolaan kawasan adalah PT Pekola dan Dinas Pariwisata. PT Pekola memegang peran utama dalam pengelolaan kawasan, perawatan fasilitas, dan pelayanan kepada pengunjung, sedangkan Dinas Pariwisata lebih banyak berperan dalam pembinaan dan pengawasan. Komunikasi antara keduanya tetap berjalan, tetapi tidak selalu dilakukan secara formal karena lebih banyak menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Keterlibatan komunitas, mahasiswa, dan masyarakat juga lebih sering muncul pada kegiatan tertentu, seperti penanaman mangrove atau edukasi lingkungan.

Dari sisi karakter struktur, hubungan antaraktor dalam pengembangan ekowisata mangrove masih banyak berjalan secara informal. Dalam hasil penelitian, Dinas Pariwisata menyampaikan bahwa belum ada wadah atau forum khusus yang secara resmi dibentuk. Hal yang sama juga terlihat dari keterangan PT Pekola yang menyebutkan bahwa koordinasi lebih banyak dilakukan sesuai kebutuhan di lapangan. Komunitas juga belum difasilitasi dalam forum resmi yang berkelanjutan, sehingga keterlibatannya masih bergantung pada kegiatan tertentu.

Pola hubungan yang belum terlembaga ini terlihat dari belum adanya forum khusus yang secara rutin mengoordinasikan seluruh aktor dalam pengembangan kawasan. Dinas Pariwisata menyampaikan bahwa pengelolaan masih berjalan melalui hubungan kelembagaan yang ada, sedangkan PT Pekola menjelaskan bahwa koordinasi lebih banyak dilakukan secara langsung antarlembaga tanpa forum kolektif yang mempertemukan seluruh aktor. Kondisi ini membuat hubungan antaraktor masih berlangsung secara parsial, terutama antara Dinas Pariwisata dan PT Pekola, sementara aktor pendukung belum terintegrasi secara aktif dalam perencanaan dan pengembangan kawasan.

3.5. Aturan Bertindak

Aturan interaksi dalam jaringan kebijakan berkaitan dengan bagaimana aktor berkomunikasi, mengambil keputusan, dan menjalankan perannya dalam pengembangan ekowisata kawasan hutan mangrove di Kota Langsa. Pada bagian ini, aturan interaksi tidak hanya dilihat dari aturan formal, tetapi

juga dari kebiasaan hubungan yang terbentuk di lapangan, termasuk siapa yang lebih banyak menentukan keputusan dan sejauh mana aktor lain diberi ruang untuk terlibat.

Zis et al. (2024) menunjukkan bahwa komunikasi kelompok dalam pengelolaan ekowisata dapat mendorong kepercayaan dan kerja sama anggota kelompok, termasuk dalam kegiatan lingkungan seperti penanaman vegetasi mangrove. Dalam konteks Kota Langsa, aturan interaksi juga perlu dilihat dari bagaimana komunikasi antaraktor membuka ruang kerja sama antara pengelola kawasan, masyarakat, komunitas, dan pihak pendukung lainnya.

Dalam pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa, pola interaksi yang paling terlihat masih berada pada hubungan antara Dinas Pariwisata Kota Langsa dan PT Pekola. Dinas Pariwisata berada pada posisi pembinaan dan pengawasan, sedangkan PT Pekola lebih banyak menjalankan pengelolaan operasional kawasan. Hubungan keduanya menunjukkan adanya pembagian peran yang cukup jelas, tetapi proses pengambilan keputusan belum sepenuhnya dilakukan bersama seluruh aktor dalam jaringan.

Keterlibatan masyarakat lokal, komunitas, dan mahasiswa dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Masyarakat lebih banyak mengikuti keputusan yang sudah ditetapkan oleh aktor utama, sedangkan komunitas dan mahasiswa umumnya terlibat pada tahap pelaksanaan kegiatan tertentu. Dalam beberapa kegiatan, mereka dapat ikut membantu kegiatan lingkungan, edukasi, penelitian, atau penanaman mangrove, tetapi belum berada pada posisi yang kuat dalam proses perumusan keputusan pengembangan kawasan.

Dari sisi keterbukaan informasi, pengembangan ekowisata mangrove di Kota Langsa tidak sepenuhnya tertutup. Aktor pendukung tetap dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan atau aktivitas yang akan dilaksanakan di kawasan. Namun, akses terhadap proses pengambilan keputusan masih belum merata. Keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan lebih banyak berada pada aktor utama sesuai kewenangan masing-masing.

Pola seperti ini menunjukkan bahwa aturan interaksi dalam jaringan kebijakan masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya partisipatif. Komunikasi tetap berjalan, tetapi belum semua aktor memiliki ruang yang sama dalam menentukan arah pengembangan kawasan. Aktor pendukung lebih banyak berperan dalam pelaksanaan atau pemanfaatan kawasan, sedangkan keputusan strategis masih didominasi oleh Dinas Pariwisata dan PT Pekola.

3.6. Hubungan Kekuasaan

Hubungan kekuasaan dalam jaringan kebijakan digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh dan kendali antaraktor terbentuk dalam pengembangan ekowisata kawasan hutan mangrove di Kota Langsa. Dalam jaringan kebijakan, kekuasaan tidak hanya dilihat dari kewenangan formal, tetapi juga dari kemampuan aktor dalam memengaruhi keputusan, mengatur sumber daya, dan menentukan arah kegiatan di lapangan.

Pada pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa, hubungan kekuasaan paling terlihat pada posisi Dinas Pariwisata Kota Langsa dan PT Pekola. Dinas Pariwisata memiliki kewenangan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengembangan sektor pariwisata daerah. Posisi ini membuat Dinas Pariwisata memiliki pengaruh dari sisi kebijakan dan arah pengembangan pariwisata. Namun, dalam praktik pengelolaan kawasan, PT Pekola memiliki pengaruh yang lebih langsung karena berada pada posisi pengelola operasional.

PT Pekola menjadi aktor yang cukup dominan karena berhubungan langsung dengan pengelolaan kawasan, fasilitas, aktivitas wisata, dan sumber daya yang ada di lapangan. Posisi tersebut membuat PT Pekola memiliki ruang pengaruh yang besar terhadap jalannya pengembangan ekowisata mangrove. Hubungan dengan aktor lain juga lebih banyak melewati PT Pekola, terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis di kawasan.

Aktor pendukung seperti desa, kecamatan, masyarakat lokal, komunitas, mahasiswa, dan pengunjung berada pada posisi yang lebih terbatas dalam hubungan kekuasaan. Mereka tetap memiliki peran dalam mendukung kegiatan kawasan, tetapi belum memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan arah pengelolaan. Masyarakat lokal dan komunitas dapat terlibat dalam kegiatan tertentu, mahasiswa dapat masuk melalui kegiatan penelitian atau edukasi, sedangkan pengunjung lebih banyak berada pada posisi penerima layanan wisata.

Pola ini menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan dalam jaringan kebijakan belum berjalan merata. Dinas Pariwisata dan PT Pekola menjadi aktor yang memiliki pengaruh paling besar, sementara aktor lain masih berada pada posisi pendukung. Ketergantungan terhadap PT Pekola sebagai pengelola lapangan membuat jaringan kebijakan cenderung terpusat, sehingga ruang keterlibatan aktor pendukung dalam proses pengambilan keputusan masih belum kuat.

3.7. Strategi Aktor

Strategi aktor dalam jaringan kebijakan berkaitan dengan cara setiap aktor menyesuaikan perannya, mengelola hubungan, dan merespons kondisi yang muncul dalam pengembangan ekowisata kawasan hutan mangrove di Kota Langsa. Strategi ini dapat terlihat dari bagaimana aktor utama menjalankan kewenangannya, bagaimana pengelola kawasan mengatur aktivitas di lapangan, serta bagaimana aktor pendukung ikut terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan ekowisata mangrove.

Dalam pengembangan Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa, strategi yang paling terlihat adalah penyesuaian struktur pengelolaan melalui peran PT Pekola sebagai pengelola kawasan. Kehadiran PT Pekola membuat pengelolaan kawasan lebih terpusat pada aktor yang secara langsung menangani operasional di lapangan. Dinas Pariwisata tetap berada pada fungsi pembinaan dan pengawasan, sedangkan PT Pekola menjalankan pengelolaan fasilitas, pelayanan, dan kegiatan kawasan secara lebih teknis.

Strategi tersebut membantu pengelolaan kawasan berjalan lebih terarah dari sisi operasional. Namun, penyesuaian struktur pengelolaan belum sepenuhnya diikuti dengan perluasan jaringan kepada aktor lain. Dalam skripsi dijelaskan bahwa pengalihan pengelolaan kepada PT Pekola belum diikuti dengan penguatan keterlibatan aktor pendukung secara lebih luas. Hubungan dengan masyarakat lokal, komunitas, dan mahasiswa masih lebih banyak muncul pada kegiatan tertentu, bukan melalui mekanisme kerja sama yang rutin dan terencana.

Strategi aktor juga terlihat dari cara kepentingan antaraktor dikelola. Perbedaan kepentingan antara pemerintah, pengelola, masyarakat, komunitas, dan pengguna kawasan tidak tampak sebagai konflik terbuka. Hubungan antaraktor lebih banyak berjalan melalui komunikasi dan penyesuaian sesuai kebutuhan di lapangan. Pola ini membuat pengelolaan tetap berjalan, tetapi ruang bagi aktor pendukung untuk memengaruhi arah pengembangan kawasan masih terbatas.

Aktor pendukung seperti masyarakat lokal, komunitas, dan mahasiswa memiliki peluang untuk memberikan dukungan melalui kegiatan lingkungan, edukasi, penelitian, atau aktivitas sosial. Akan tetapi, peluang tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi strategi kolaboratif yang kuat. Keterlibatan mereka masih bergantung pada kegiatan tertentu, sehingga gagasan dan kontribusi dari aktor pendukung belum banyak masuk dalam arah pengembangan kawasan.

Strategi aktor dalam jaringan kebijakan ekowisata mangrove di Kota Langsa masih lebih kuat pada penataan pengelolaan operasional dibandingkan pada penguatan kolaborasi. Pengelolaan kawasan sudah memiliki aktor yang jelas melalui PT Pekola, tetapi jaringan dengan aktor pendukung belum berkembang secara seimbang. Ruang komunikasi memang ada, tetapi belum cukup untuk membentuk kerja sama yang berkelanjutan antaraktor dalam pengembangan ekowisata mangrove.

3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa jaringan kebijakan ekowisata kawasan hutan mangrove di Kota Langsa telah melibatkan beberapa aktor, tetapi hubungan antaraktor belum sepenuhnya merata. Aktor yang terlibat terdiri atas Dinas Pariwisata Kota Langsa, PT Pekola, desa, kecamatan, masyarakat lokal, komunitas, mahasiswa, dan pengunjung. Dari aktor-aktor tersebut, PT Pekola terlihat memiliki posisi paling sentral karena berperan langsung dalam pengelolaan operasional kawasan, sedangkan Dinas Pariwisata berada pada fungsi pembinaan dan pengawasan. Aktor lain tetap terlibat, tetapi keterlibatannya masih lebih banyak muncul pada kegiatan tertentu.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Alfiandri et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata mangrove membutuhkan tata kelola kolaboratif agar hubungan antarstakeholder dapat berjalan lebih terarah. Dalam konteks Kota Langsa, hubungan antaraktor memang sudah terbentuk, tetapi belum sepenuhnya menjadi kolaborasi yang stabil. Koordinasi paling kuat masih berada pada aktor utama, sementara masyarakat lokal, komunitas, dan mahasiswa belum memiliki ruang keterlibatan yang sama dalam jaringan kebijakan.

Temuan penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan Alfiandri dan Irawan (2023) yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai unsur dalam kebijakan ekowisata mangrove melalui pendekatan penta helix. Pemerintah, pengelola, komunitas, akademisi, masyarakat, dan pihak lain seharusnya dapat saling mendukung dalam pengembangan kawasan. Namun, pada Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa, keterlibatan aktor pendukung belum berjalan secara rutin dan masih bergantung pada kegiatan tertentu, seperti kegiatan lingkungan, edukasi, atau penelitian.

Dari sisi jaringan aktor, temuan ini juga sejalan dengan Nijamdeen et al. (2022) yang menunjukkan bahwa pengelolaan mangrove membutuhkan keterhubungan yang kuat antarstakeholder. Hubungan yang lemah dapat membuat jaringan tidak bekerja secara optimal, meskipun aktor yang terlibat sebenarnya sudah cukup beragam. Hal yang sama terlihat di Kota Langsa, karena keberadaan aktor tidak otomatis membuat jaringan berjalan seimbang apabila hubungan, koordinasi, dan ruang keterlibatan antaraktor belum terbentuk secara kuat.

Temuan ini juga dapat dibandingkan dengan Khan et al. (2024) yang menjelaskan bahwa tata kelola hutan mangrove dipengaruhi oleh posisi dan pengaruh aktor dalam jaringan. Dalam penelitian ini, PT Pekola memiliki pengaruh yang besar karena mengelola kawasan secara langsung. Posisi tersebut membuat hubungan dalam jaringan cenderung terpusat pada pengelola operasional. Sementara itu, aktor pendukung berada pada posisi yang lebih terbatas dan belum banyak memengaruhi arah pengembangan kawasan.

Jika dibandingkan dengan penelitian Sahudra et al. (2020), penelitian ini memiliki perbedaan fokus. Sahudra et al. (2020) membahas peran qanun dalam pengembangan ekowisata hutan mangrove di Kuala Langsa, sedangkan penelitian ini melihat bagaimana jaringan kebijakan bekerja melalui hubungan antaraktor. Kesamaan lokus menunjukkan bahwa Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa memang telah menjadi perhatian dalam kajian sebelumnya, tetapi pembahasan mengenai struktur hubungan, posisi aktor, dan keterhubungan dalam jaringan kebijakan masih perlu diperjelas.

Berdasarkan hasil penelitian, persoalan utama dalam jaringan kebijakan ekowisata mangrove di Kota Langsa bukan terletak pada tidak adanya aktor yang terlibat. Aktor dalam jaringan sudah ada dan memiliki peran masing-masing. Persoalan yang lebih terlihat adalah belum kuatnya hubungan antarpihak, belum adanya forum kolaboratif yang berjalan secara rutin, serta masih terbatasnya ruang aktor pendukung dalam proses pengembangan kawasan. Pengelolaan ekowisata mangrove masih banyak bertumpu pada aktor utama, terutama PT Pekola sebagai pengelola lapangan, sedangkan potensi keterlibatan masyarakat lokal, komunitas, mahasiswa, dan pihak lain belum sepenuhnya berkembang dalam jaringan kebijakan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa jaringan kebijakan ekowisata kawasan hutan mangrove di Kota Langsa Provinsi Aceh belum terintegrasi secara optimal. Hal ini terlihat dari keterlibatan aktor yang sudah cukup beragam, meliputi Dinas Pariwisata Kota Langsa, PT Pekola, desa, kecamatan, masyarakat lokal yang direpresentasikan melalui tukang parkir dan pawang monyet, komunitas, mahasiswa, dan pengunjung, tetapi hubungan antaraktor belum berjalan merata. Struktur jaringan masih cenderung terpusat pada PT Pekola sebagai pengelola operasional kawasan, sedangkan aktor pendukung masih lebih banyak terlibat pada kegiatan tertentu. Oleh karena itu, jaringan kebijakan ekowisata mangrove di Kota Langsa masih perlu diperkuat melalui hubungan, koordinasi, dan kolaborasi antaraktor yang lebih terarah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokus dan fokus kajian yang hanya dilakukan pada jaringan kebijakan ekowisata kawasan hutan mangrove di Kota Langsa. Penelitian ini juga lebih menekankan pada hubungan antaraktor dalam jaringan kebijakan, sehingga belum membahas secara mendalam dampak ekonomi, ekologis, dan sosial dari pengembangan ekowisata mangrove terhadap masyarakat sekitar kawasan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji jaringan kebijakan ekowisata mangrove pada daerah lain sebagai bahan perbandingan. Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan analisis dengan melihat hubungan antara jaringan kebijakan dan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan, peningkatan ekonomi masyarakat, serta kualitas tata kelola ekowisata mangrove secara lebih luas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Langsa, khususnya Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Langsa serta PT Pekola selaku pengelola Kawasan Hutan Mangrove Kota Langsa, yang telah memberikan kesempatan, data, informasi, dan dukungan kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan, masyarakat lokal, komunitas, mahasiswa, pengunjung, dan pihak terkait yang telah meluangkan waktu serta membantu kelancaran proses pengumpulan data hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alfiandri, A., & Irawan, B. (2023). Collaborative governance in mangrove ecotourism policy on Bintan Island coastal approach of penta helix. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 7*(1), 171–191. https://doi.org/10.24198/jmpp.v7i1.49066

Alfiandri, A., Prasojo, E., & Malik, J. A. (2024). Fostering sustainable mangrove ecotourism: A collaborative governance approach on Bintan Island, Indonesia. *Jurnal Studi Pemerintahan, 15*(3), 340–362. https://doi.org/10.18196/jsp.v15i3.334

Azzahra, P. R., Sumarga, E., & Sholihah, A. (2023). Mangrove ecotourism development at Karimunjawa National Park, Indonesia. *Biodiversitas, 24*(8), 4457–4468. https://doi.org/10.13057/biodiv/d240827

Bainbridge, J. M., Potts, T., & O'Higgins, T. G. (2011). Rapid policy network mapping: A new method for understanding governance structures for implementation of marine environmental policy. *PLOS ONE, 6*(10), Article e26149. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0026149

Doni, S., & Prasetyo, A. (2021). Pengembangan kawasan ekowisata dalam Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Labuhanbatu melalui pariwisata berbasis masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 47*(2), 159–174. https://doi.org/10.33701/jipwp.v47i2.1711

Felani, H., & Rahmadi, T. S. (2022). Pengembangan wisata berbasis masyarakat di lokasi wisata Pantai Jakat Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 14*(1), 21–35. https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i1.2703

Hapsari, D. M., & Ardiansyah, B. K. (2020). Prospek Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong terhadap lima kawasan ekowisata di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 5*(1), 67–82. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/1063/647

Khan, M. F. A. K., Rahman, M. S., Maryudi, A., Schusser, C., & Giessen, L. (2024). Revealing the multilevel actors power network in mangrove forest governance: Insights from the Sundarbans, Bangladesh. *Forest and Society, 8*(2), 372–401. https://doi.org/10.24259/fs.v8i2.32924

Nijamdeen, T. W. G. F. M., Hugé, J., Ratsimbazafy, H. A., Kodikara Arachchilage, S. K., & Dahdouh-Guebas, F. (2022). A *social network analysis* of mangrove management stakeholders in Sri Lanka's Northern Province. *Ocean & Coastal Management, 228*, Article 106308. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106308

Osman, T., Shaw, D., & Kenawy, E. (2018). Examining the extent to which stakeholder collaboration during ecotourism planning processes could be applied within an Egyptian context. *Land Use Policy, 78*, 126–137. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.06.043

Pemerintah Kota Langsa. (2015). *Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Langsa*.

Putri, A. R. S., & Munawaroh, N. (2018). Koordinasi pemangku kepentingan dalam meningkatkan strategi pengembangan Destination Management Organization (DMO) di Pangandaran: Studi pada Disparperindagkop UMKM dan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat. *Jurnal MP: Manajemen Pemerintahan, 5*(1), 19–33. https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/445

Roxas, F. M. Y., Rivera, J. P. R., & Gutierrez, E. L. M. (2020). Mapping stakeholders' roles in governing sustainable tourism destinations. *Journal of Hospitality and Tourism Management, 45*, 387–398. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.09.005

Sahudra, T. M., Desfandi, M., & Nisa, J. (2020). The role of the Qanun in the development of mangrove forest ecotourism in Kuala Langsa, Aceh. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 20*(2), 230–241. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v20i2.601

Salman, A., Jaafar, M., Mohamad, D., & Khoshkam, M. (2023). Understanding multi-stakeholder complexity & developing a causal recipe (fsQCA) for achieving sustainable ecotourism. *Environment, Development and Sustainability, 25*(9), 10261–10284. https://doi.org/10.1007/s10668-022-02488-z

Santoso, E. B. (2017). Ecotourism pada tingkat komunitas di kawasan wisata Pangandaran. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 43*(1), 1–20. https://doi.org/10.33701/jipwp.v43i1.56

Waarden, F. (1992). Dimensions and types of policy networks. *European Journal of Political Research, 21*(1–2), 29–52. https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1992.tb00287.x

Zis, S. F., Yonariza, Y., Tanjung, H. B., & Arief, E. (2024). Komunikasi Kelompok Sadar Pariwisata dalam pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 4*(1), 98–110. https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm/article/view/3943